

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
 NOMOR : 66 TAHUN 2022
 TENTANG : PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

A. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I A B		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KEBIJAKAN Kebijakan dan standarisasi teknis di bidang politik dan dalam negeri, kesatuan bangsa dan politik, pemerintahan umum, otonomi daerah, bina pembangunan daerah, pemberdayaan masyarakat dan desa, kependudukan dan pencatatan sipil serta keuangan daerah a. Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan b. Penyusunan Kebijakan c. Perumusan Kebijakan d. Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) e. MOU	Biasa/Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan a. Ketahanan Ideologi Negara 1) penguatan ideologi negara 2) implementasi ideologi negara b. Wawasan Kebangsaan 1) penguatan wawasan kebangsaan 2) pembinaan dan sosialisasi 3) implementasi c. Bela Negara 1) pendidikan bela negara 2) pemberdayaan bela negara d. Nilai-Nilai Sejarah Kebangsaan 1) penguatan nilai-nilai sejarah 2) implementasi nilai-nilai sejarah 3) penerbitan rekomendasi penelitian e. Pembauran dan Kewarganegaraan 1) pembinaan pembauran kebangsaan	Biasa/Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait

NO	KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		2) pembinaan kewarganegaraan 2. Kewaspadaan Nasional a. Fasilitasi dan Evaluasi Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan b. Fasilitasi Bina Masyarakat Perbatasan Antar Negara dan Kehidupan Masyarakat Perbatasan c. Fasilitasi dan Evaluasi Penanganan Konflik Pemerintahan d. Fasilitasi dan Laporan Penanganan Konflik Sosial 1) pedoman kewaspadaan nasional e. Fasilitasi Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing 1) pelaksanaan pengawasan kegiatan orang asing dan lembaga asing 2) surat pemberitahuan penelitian orang asing 3. Ketahanan Seni, Budaya, Adat, Agama, dan kemasyarakatan a. Ketahanan Seni 1) fasilitasi pelaksanaan pelestarian kesenian 2) pelaksanaan dan perkembangan nilai-nilai kesenian b. Ketahanan Budaya 1) fasilitasi pelaksanaan pelestarian kebudayaan 2) pelaksanaan dan perkembangan nilai-nilai kebudayaan c. Agama dan Kepercayaan 1) fasilitasi 2) data Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kabupaten 3) pelaksanaan kerukunan umat beragama dan kepercayaan 4) pelestarian nilai-nilai keagamaan dan kepercayaan d. Organisasi Kemasyarakatan 1) pelaksanaan identifikasi dan kompilasi organisasi masyarakat a) pendaftaran Ormas b) database Ormas	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
			Biasa/Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		2) laporan hasil kerjasama kegiatan dengan ORMAS/LNL 3) evaluasi aktifitas Ormas : sanksi administrasi 4) fasilitasi sengketa Ormas 5) fasilitasi Ormas e. Masalah sosial kemasyarakatan 1) fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba 2) masalah sosial kemasyarakatan 4. Politik Dalam Negeri a. Implementasi Kebijakan Politik 1) implementasi kebijakan politik a) sosialisasi dan publikasi best practise dan inovasi 2) pelaksanaan monitoring dan evaluasi b. Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan 1) evaluasi kelembagaan politik pemerintahan dipusat a) pendampingan kunjungan kerja DPR-RI 2) evaluasi kelembagaan politik pemerintahan daerah a) orientasi anggota DPRD Provinsi/Kab/Kota c. Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik 1) verifikasi dan evaluasi partai politik yang memperoleh kursi 2) partai politik yang tidak memperoleh kursi 3) pemerintah daerah 4) database parpol d. Pendidikan Budaya Politik 1) fasilitasi penyelenggaraan pendidikan budaya politik 2) penyelenggaraan pendidikan budaya politik 3) modul sebagai sarana penyelenggaraan pendidikan	Biasa/Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
			Biasa/Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
			Biasa/Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
			Biasa/Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait

NO	KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
C		e. Pemilihan Umum	Biasa/Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		1) fasilitasi penyelenggaraan pemilu					
		2) evaluasi pelaksanaan pemilu umum wakil rakyat					
		3) evaluasi pemilihan umum Presiden dan wakil presiden					
		4) laporan hasil perkembangan politik di daerah					
		5) laporan hasil kerjasama kegiatan dengan ORMAS/LSM/LNL					
		5. Ketahanan Ekonomi					
		a. Ketahanan Sumberdaya Alam dan Kesenjangan Perekonomian	Biasa/Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		1) fasilitasi ketahanan dibidang sumberdaya alam					
		a) sosialisasi dan publikasi best practise dan inovasi					
		2) penanganan kesenjangan perekonomian					
		b. Ketahanan Perdagangan Investasi, Fiskal dan Moneter	Biasa/Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		1) fasilitasi identifikasi ketahanan dibidang perdagangan, investasi fiskal dan moneter					
2) penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi monitoring dan evaluasi							
c. Perilaku Perekonomian Masyarakat	Biasa/Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait		
1) pembinaan organisasi kemasyarakatan perekonomian							
2) evaluasi cinta produk dalam negeri dan perlindungan konsumen							
d. Ketahanan Lembaga Sosial ekonomi	Biasa/Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait		
		1) evaluasi pelaksanaan hubungan kerjasama penanganan kejahatan lembaga perekonomian					
		2) evaluasi pelaksanaan koordinasi kebijakan lembaga perekonomian					
		PEMERINTAHAN UMUM					

NO	KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLOH
1	2	3	4	5	6	7	8
		1) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan perlindungan masyarakat	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
		2) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pembinaan aparatur dan kelembagaan perlindungan masyarakat					
		d. Penyidik Pegawai Negeri Sipil					
		1) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pembinaan operasional penyidik pegawai negeri sipil					
		2) fasilitasi koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pembinaan dan evaluasi administrasi aparatur penyidik pegawai negeri sipil					
		e. Perlindungan Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia					
		1) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan supervisi hak asasi manusia					
		2) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi konvensi internasional					
		4. Kawasan dan Pertanahan					

NO	KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>a. Kawasan Sumber Daya Alam</p> <p>fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan 1) pemerintahan pada kawasan sumberdaya alam yang mencakup kawasan hutan, tambang, pertanian, dan lingkungan</p> <p>b. Kawasan Sumber Daya Buatan</p> <p>fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan 1) pemerintahan pada kawasan perhubungan darat, laut dan udara</p> <p>c. Kawasan Ekonomi, Industri dan Perdagangan Bebas</p> <p>fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan 1) pada kawasan ekonomi, industri dan perdagangan bebas</p>	<p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p>	<p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p> <p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p> <p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p>	<p>Tertutup</p> <p>Tertutup</p> <p>Tertutup</p>	<p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan</p> <p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan</p> <p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan</p>	<p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p>

NO	KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>d. Pertanahan dan Kawasan Khusus</p> <p>1) penyelenggaraan urusan pertanahan 2) penyelesaian sengketa pertanahan 3) evaluasi penataan kawasan khusus</p> <p>e. Kawasan Perairan, Kelautan dan Kerdigantaraan</p> <p>1) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan pada kawasan perairan, kelautan dan kerdigantaraan 2) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pembinaan kawasan perairan, kelautan dan kerdigantaraan</p> <p>5. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana</p> <p>a. Identifikasi Potensi Bencana</p> <p>1) evaluasi pelaksanaan pencegahan bencana dan mitigasi bencana</p> <p>b. Organisasi Sistem dan Prosedur</p> <p>1) pengembangan kerjasama kelembagaan serta penanggulangan bencana a) fasilitasi - database daerah rawan bencana</p>	<p>Rahasia</p> <p>Terbatas</p> <p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p>	<p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p> <p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p> <p>Pengguna Internal dan Eksternal</p> <p>Pengguna Internal dan Eksternal</p>	<p>Tertutup</p> <p>Tertutup</p> <p>Terbuka</p> <p>Terbuka</p>	<p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum</p> <p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan</p> <p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun</p> <p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun</p>	<p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p>

NO	KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
D.		b) koordinasi c) fasilitasi serta koordinasi tanggap darurat penanggulangan bencana	Biasa/Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		c. Sarana dan Prasarana					
		1) evaluasi standardisasi aplikasi peralatan penyelenggaraan penanggulangan bencana 2) evaluasi pengembangan informasi dan teknologi penyelenggaraan penanggulangan bencana					
		d. Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Biasa/Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		1) evaluasi pengembangan pemberdayaan masyarakat dibidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran 2) evaluasi peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran					
		OTONOMI DAERAH	Biasa/Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		1. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah					
		a. Fasilitasi, Bimbingan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi 1) pelaksanaan urusan pemerintahan daerah 2) penyusunan standar pelayanan minimal	Biasa/Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		2. Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi Penataan Daerah, Pembinaan Daerah Pemekaran					
		3. Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi Kepala Daerah, DPRD, dan Hubungan Antar lembaga a. penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah b. administrasi kepala daerah dan DPRD c. penyiapan perumusan kebijakan pemberdayaan kapasitas kepala daerah dan DPRD di bidang pemerintahan d. hubungan antar lembaga daerah (pemerintah daerah dan DPRD)	Biasa/Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait

NO	KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
E.		e. assosiasi daerah					
		4. Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi Peningkatan kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah	Biasa/Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		a. kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah b. kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah c. pengembangan kapasitas daerah					
		BINA PEMBANGUNAN DAERAH					
		1. Perencanaan Pembangunan Daerah/Per Wilayah	Biasa/Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		2. Pengembangan Wilayah	Biasa/Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		a. penyusunan pedoman penyerasian pengembangan wilayah b. penyusunan dan pemutahiran basis data dan informasi pengembangan wilayah c. penyusunan dan laporan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah d. Kawasan Strategis dan Andalan 1) evaluasi pengembangan data 2) pengembangan kawasan strategis dan andalan e. Wilayah Tertinggal 1) penyusunan data dan pemutahiran basis dan data informasi pengembangan wilayah tertinggal 2) penyusunan laporan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah tertinggal f. Wilayah Pesisir Laut dan Pulau-Pulau Kecil 1) penyusunan masterplan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah tertinggal 2) penyusunan dan pemutahiran basis data dan informasi pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 3. Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup					
		a. Penataan Ruang Wilayah	Biasa/Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait

[illegible]

NO	KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		2) pengembangan produk unggulan dan pemanfaatan potensi ekonomi daerah					
		b. Promosi dan Investasi Daerah	Biasa/Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		1) pelaksanaan promosi ekonomi daerah 2) pelaksanaan investasi daerah					
		c. Sarana dan Prasarana Perekonomian Daerah	Biasa/Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		1) pelaksanaan pengembangan perdagangan daerah 2) pelaksanaan perindustrian daerah					
		d. Kemitraan Usaha	Biasa/Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		1) perencanaan dan pengembangan kemitraan usaha ekonomi daerah 2) pengelolaan kemitraan usaha ekonomi daerah					
		e. Kelembagaan Ekonomi Daerah	Biasa/Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		1) pelaksanaan pengembangan kelembagaan ekonomi daerah 2) penguatan kapasitas kelembagaan ekonomi daerah					
		5. Penataan Perkotaan					
		a. Perencanaan Pengendalian Perkotaan	Biasa/Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		1) evaluasi perencanaan perkotaan 2) pengendalian penataan perkotaan 3) fasilitasi					

NO	KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
F.		b. Penataan Kota besar dan Metropolitan, Kota Menengah, dan Kota Kecil 1) pengendalian pelaksanaan pengembangan prasarana dan sarana perkotaan 2) pengendalian pelaksanaan pemanfaatan, pemeliharaan lingkungan perkotaan 3) fasilitasi	Biasa/Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		c. Kerjasama Perkotaan 1) pengendalian kerjasama perkotaan antar negara 2) pengendalian pelaksanaan pemanfaatan, pemeliharaan lingkungan perkotaan 3) fasilitasi	Biasa/Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1. Pemerintahan Desa dan Kelurahan a. Fasilitasi Pengembangan Desa dan Kelurahan 1) pelaksanaan pengembangan desa 2) pelaksanaan pengembangan kelurahan b. Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan 1) pembinaan administrasi pemerintahan desa 2) pembinaan administrasi pemerintahan kelurahan c. Fasilitasi Permusyawaratan Desa 1) pelaksanaan penataan kelembagaan badan permusyawaratan desa 2) pelaksanaan penataan kewenangan badan permusyawaratan desa d. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa 1) pembinaan pengelolaan keuangan desa 2) pelaksanaan pengelolaan aset desa e. Pengembangan Kapasitas Desa 1) pelaksanaan pengembangan kapasitas pemerintahan desa dan kelurahan 2) pelaksanaan pengembangan kapasitas badan permusyawaratan desa dan masyarakat	Biasa/Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait

NO	KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>2. Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat</p> <p>a. Lembaga Masyarakat</p> <p>1) pembinaan penataan lembaga masyarakat di desa</p> <p>2) pelaksanaan kerjasama lembaga masyarakat</p> <p>b. Pembangunan Partisipatif</p> <p>1) pelaksanaan pembangunan metode pembangunan partisipatif</p> <p>2) pelaporan kinerja pembangunan desa</p> <p>c. Pendataan Potensi Masyarakat</p> <p>1) inventarisasi potensi masyarakat</p> <p>a) profil desa</p> <p>2) evaluasi perkembangan masyarakat</p> <p>d. Pengembangan Kawasan Pedesaan</p> <p>1) pelaksanaan identifikasi dan analisa penataan ruang kawasan pedesaan</p> <p>2) pelaksanaan penataan pengembangan terpadu kawasan pedesaan</p> <p>e. Pelatihan Masyarakat</p> <p>1) pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kurikulum pelatihan masyarakat</p> <p>a) grand design pelatihan masyarakat</p> <p>b) pedoman pelatihan masyarakat</p> <p>c) fasilitasi</p> <p>d) monitoring dan evaluasi</p> <p>2) evaluasi pelatihan masyarakat</p> <p>a) penyelenggaraan pelatihan</p> <p>b) monitoring dan evaluasi</p> <p>3. Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat</p> <p>a. Budaya Nusantara</p> <p>1) pelaksanaan pemberdayaan masyarakat</p> <p>2) pelaksanaan kerjasama adat istiadat</p> <p>b. Pemberdayaan Perempuan</p> <p>1) pelaksanaan peningkatan pemberdayaan perempuan</p> <p>2) pembinaan, perlindungan hak-hak perempuan dan ketidaksetaraan gender</p> <p>c. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga</p> <p>1) pelaksanaan pemberdayaan keluarga</p>	Biasa/Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
			Biasa/Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait

NO	KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		2) pembinaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga d. Kesejahteraan Sosial 1) pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial 2) pelaksanaan penanganan masalah sosial e. Tenaga Kerja Pedesaan 1) fasilitasi dan evaluasi pembinaan dan pembinaan tenaga kerja 2) fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja 4. Usaha Ekonomi Masyarakat a. Usaha Pertanian dan Pangan 1) pembinaan dan pengembangan usaha pertanian, agribisnis dan Lumbung Pangan a) identifikasi data pertanian b) fasilitasi c) monitoring dan evaluasi b. Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam 1) pelaksanaan peningkatan kerjasama dan permodalan usaha perkreditan dan simpan pinjam a) inventarisasi lembaga keuangan mikro yang belum berbadan hukum b) inventarisasi dan pemetaan potensi desa c) inventarisasi badan usaha milik desa d) usaha ekonomi desa simpan pinjam e) fasilitasi pembinaan, pendampingan dan pengawasan f) monitoring dan evaluasi 2) pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan usaha perkreditan dan simpan pinjam a) fasilitasi pembinaan, pendampingan dan pengawasan b) monitoring dan evaluasi c. Produksi dan Pemasaran 1) pelaksanaan pengembangan informasi pasar a) identifikasi produk unggulan pedesaan b) fasilitasi c) monitoring dan evaluasi 2) pelaksanaan diversifikasi pasar a) fasilitasi pengelolaan pasar desa b) fasilitasi sarana dan prasarana desa c) sistem penilaian kinerja pasar desa/lomba pasar desa d) monitoring dan evaluasi	Biasa/Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait

NO	KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		e) data pasar desa d. Usaha Ekonomi dan Keluarga 1) pelaksanaan peningkatan kewirausahaan dan perkoperasian a) fasilitasi pengembangan usaha ekonomi keluarga b) monitoring dan evaluasi 2) pelaksanaan pengembangan usaha jasa dan industri kecil a) penyusunan modul b) fasilitasi c) monitoring dan evaluasi e. Ekonomi pedesaan dan Masyarakat Tertinggal 1) ekonomi pedesaan a) identifikasi dan inventarisasi pengembangan usaha ekonomi pedesaan b) fasilitasi pengembangan usaha ekonomi pedesaan c) monitoring dan evaluasi 2) Masyarakat tertinggal a) identifikasi dan inventarisasi pengembangan masyarakat dan desa tertinggal b) fasilitasi pengembangan masyarakat dan desa tertinggal c) monitoring dan evaluasi 5. Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna Pedesaan a. Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan Pedesaan 1) pembinaan pengelolaan konservasi kawasan 2) pelaksanaan rehabilitasi lingkungan b. Fasilitasi Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Pedesaan 1) pelaksanaan pengembangan dan pendayagunaan sumberdaya lahan pedesaan 2) pelaksanaan pengembangan dan pendayagunaan sumberdaya pesisir pedesaan c. Fasilitasi Prasarana dan Sarana Pedesaan 1) pembinaan pengelolaan prasarana air dan sanitasi lingkungan 2) pembinaan pengelolaan prasarana dan sarana pemukiman d. Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Pedesaan 1) pelaksanaan pemetaan kebutuhan teknologi pedesaan 2) pelaksanaan pengkajian pemanfaatan teknologi pedesaan e. Pemasarakatan dan Kerjasama Teknologi Pedesaan 1) pelaksanaan pamasarakatan teknologi pedesaan 2) pelaksanaan kerjasama pengelolaan teknologi pedesaan	Biasa/Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait

NO	KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
G.		KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1. Pendaftaran Penduduk a. Identitas Penduduk 1) fasilitasi pelaksanaan pelayanan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk 2) penyiapan pemberian nomor kendali kartu keluarga dan kartu tanda penduduk 3) fasilitasi pencetakan dan distribusi blangko dokumen kependudukan b. Pindah Datang Penduduk dalam Wilayah NKRI 1) fasilitasi pelaksanaan pindah datang penduduk WNI 2) fasilitasi pelaksanaan pindah datang penduduk orang asing c. Pindah Datang Penduduk Antar Negara 1) fasilitasi pelaksanaan pendaftaran perpindahan penduduk Indonesia keluar Negeri dan WNI dari luar negeri 2) fasilitasi pelaksanaan pendaftaran orang asing tinggal terbatas d. Pendataan Penduduk Rentan 1) fasilitasi pelaksanaan pendataan penduduk korban bencana 2) fasilitasi pelaksanaan pendataan penduduk daerah terbelakang 3) fasilitasi pelaksanaan pendataan orang terlantar 4) pendaftaran penduduk rentan administrasi kependudukan e. Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi 1) monitoring pelaksanaan program pendaftaran penduduk 2) evaluasi pelaksanaan program pendaftaran penduduk 3) pelaksanaan dokumentasi kebijakan pendaftaran penduduk 2. Pencatatan Sipil a. Kelahiran dan Kematian 1) fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran 2) fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan kematian 3) fasilitasi pelaksanaan pencatatan kelahiran dan kematian 4) pelaksanaan hubungan antarlembaga dalam rangka pencatatan kelahiran dan kematian	Biasa/Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
			Biasa/Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait

NO	KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>b. Perkawinan dan Perceraian</p> <p>1) fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian agama islam</p> <p>2) fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian agama non islam</p> <p>3) pencatatan perkawinan dan perceraian</p> <p>4) pelaksanaan hubungan antarlembaga dalam rangka pencatatan perkawinan dan perceraian</p> <p>c. Pengangkatan Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan dan Pembatalan Akta</p> <p>1) pelayanan perubahan dan pembatalan akta</p> <p>2) pengangkatan pengakuan dan pengesahan anak serta perubahan dan pembatalan akta</p> <p>3) pelaksanaan hubungan antarlembaga dalam rangka pengangkatan pengakuan dan pengesahan anak serta perubahan dan pembatalan akta</p> <p>d. Pencatatan Kewarganegaraan</p> <p>1) pelaksanaan pelayanan pencatatan pewarganegaraan akibat kelahiran</p> <p>2) pelaksanaan pelayanan pencatatan pewarganegaraan akibat non kelahiran</p> <p>3) pelaksanaan pencatatan pewarganegaraan kelahiran dan non kelahiran</p> <p>4) pelaksanaan hubungan antarlembaga dalam rangka pengangkatan pelayanan</p> <p>e. Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi</p>	<p>Terbatas</p> <p>Rahasia</p> <p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p>	<p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p> <p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p> <p>Pengguna Internal dan Eksternal</p> <p>Pengguna Internal dan Eksternal</p>	<p>Tertutup</p> <p>Tertutup</p> <p>Terbuka</p> <p>Terbuka</p>	<p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan</p> <p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara sumber</p> <p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun</p> <p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun</p>	<p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p>

NO	KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		1) penyusunan program dan kegiatan direktorat pencatatan sipil 2) monitoring pelaksanaan program pencatatan sipil 3) evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil 4) pelaksanaan dokumentasi kebijakan pencatatan sipil 3. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan a. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 1) perencanaan pengembangan sistem informasi kependudukan 2) pengembangan aplikasi 3) pengembangan pemanfaatan infrastruktur b. Kelembagaan Informasi Administrasi Kependudukan 1) pengembangan sistem kelembagaan 2) pengembangan sumber daya manusia 3) kelembagaan informasi kependudukan c. Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan 1) pengelolaan data administrasi kependudukan 2) pemeliharaan database administrasi kependudukan 3) pengembangan database administrasi kependudukan 4) pelayanan pengelolaan data administrasi kependudukan d. Penyajian dan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan 1) penyajian informasi administrasi kependudukan 2) pelaksanaan pelayanan informasi melalui media elektronik 3) pelaksanaan layanan informasi melalui media cetak	Biasa/Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
			Biasa/Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
			Biasa/Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
			Biasa/Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait

NO	KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>e. Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi</p> <p>1) pengembangan materi wawasan kependudukan melalui jalur sekolah dan melalui jalur luar sekolah</p> <p>2) kebijakan kependudukan dan pengembangan wawasan kependudukan</p> <p>3) pelaksanaan hubungan antarlembaga dalam rangka pengembangan wawasan</p> <p>4) pelaksanaan dokumentasi pelayanan informasi kependudukan</p> <p>4. Pengembangan Kebijakan Kependudukan</p> <p>a. Kuantitas Penduduk</p> <p>1) pelaksanaan penyusunan analisis jumlah, struktur dan komposisi penduduk</p> <p>2) pelaksanaan analisis pertumbuhan penduduk</p> <p>3) kebijakan kuantitas penduduk</p> <p>b. Kualitas Penduduk</p> <p>1) pelaksanaan kebijakan kualitas penduduk usia anak, remaja dan pemuda</p> <p>2) pelaksanaan kebijakan kualitas penduduk usia produktif dan lanjut usia</p> <p>3) pelaksanaan hubungan antarlembaga dalam rangka kebijakan kualitas penduduk</p> <p>c. Mobilitas Penduduk</p> <p>1) pelaksanaan penataan persebaran penduduk antarwilayah</p> <p>2) pelaksanaan penataan urbanisasi dan migrasi non permanen</p> <p>3) kebijakan mobilitas penduduk</p>	<p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p>	<p>Pengguna Internal dan Eksternal</p> <p>Pengguna Internal dan Eksternal</p> <p>Pengguna Internal dan Eksternal</p> <p>Pengguna Internal dan Eksternal</p>	<p>Terbuka</p> <p>Terbuka</p> <p>Terbuka</p> <p>Terbuka</p>	<p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun</p> <p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun</p> <p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun</p> <p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun</p>	<p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p>

NO	KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>d. Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk</p> <p>1) pelaksanaan pengembangan sistem perlindungan penduduk</p> <p>2) pelaksanaan pengembangan sistem pemberdayaan penduduk</p> <p>3) perlindungan dan pemberdayaan penduduk</p> <p>e. Pengembangan Wawasan Kependudukan, Monitoring dan Evaluasi</p> <p>1) pengembangan materi wawasan kependudukan melalui jalur sekolah dan melalui jalur luar sekolah</p> <p>2) pengembangan wawasan kependudukan</p> <p>3) pelaksanaan hubungan antar lembaga dalam rangka pengembangan wawasan kependudukan</p> <p>5. Penyerasian Kependudukan</p> <p>a. Indikator Kependudukan</p> <p>1) pelaksanaan analisis indikator kependudukan</p> <p>2) penyusunan indikator statis kependudukan</p> <p>3) pelaksanaan penerapan pengembangan indikator kependudukan</p> <p>4) penyusunan dan penetapan indikator kependudukan</p> <p>b. Proyeksi Penduduk</p> <p>1) pelaksanaan analisis proyeksi penduduk</p> <p>2) pelaksanaan penyusunan proyeksi penduduk</p> <p>3) pelaksanaan perumusan implikasi proyeksi penduduk</p> <p>4) penyusunan penetapan dan perumusan implikasi proyeksi penduduk</p>	<p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p>	<p>Pengguna Internal dan Eksternal</p> <p>Pengguna Internal dan Eksternal</p> <p>Pengguna Internal dan Eksternal</p> <p>Pengguna Internal dan Eksternal</p>	<p>Terbuka</p> <p>Terbuka</p> <p>Terbuka</p> <p>Terbuka</p>	<p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun</p> <p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun</p> <p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun</p> <p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun</p>	<p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p>

NO	KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
H		c. Perencanaan Kependudukan	Biasa/Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		1) pelaksanaan perencanaan kependudukan					
		2) pelaksanaan penyusunan analisis dampak kependudukan					
		3) pelaksanaan penyiapan perencanaan kependudukan					
		4) penyusunan dan penetapan perencanaan kependudukan					
		d. Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Non Pemerintah	Biasa/Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		1) penyelesaian kebijakan kependudukan dengan lembaga internasional					
		2) penyelesaian kebijakan kependudukan dengan lembaga masyarakat dan nirlaba					
		3) penyerasian kebijakan kependudukan dengan lembaga usaha swasta					
		4) penyerasian kebijakan kependudukan dengan lembaga non pemerintah					
		e. Pelaksanaan penyerasian kebijakan kependudukan dengan lembaga pemerintah	Biasa/Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		KEUANGAN DAERAH					
		1. Anggaran Daerah					
		a. Anggaran Daerah Wilayah I, II, III, dan IV	Biasa/Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		1) fasilitasi anggaran daerah antara lain : konsultasi, narasumber, bimbingan teknis					
		2) evaluasi rancangan perda, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten					
		3) monitoring					
		b. Dukungan Teknis Anggaran Daerah	Biasa/Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		1) penyiapan bahan perumusan sinkronisasi kebijakan anggaran daerah					
		2) penyusunan tatalaksana anggaran daerah					
		3) penyiapan dukungan teknis anggaran daerah					

NO	KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		4) penyiapan data, informasi dan penyusunan laporan keuangan daerah 2. Pendapatan dan Investasi Daerah a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 1) fasilitasi pelaksanaan kebijakan standardisasi pajak daerah dan retribusi daerah 2) penyiapan bahan perumusan bimbingan teknis pajak daerah dan retribusi daerah 3) penyiapan bahan perumusan analisis dan evaluasi, pemantauan pajak daerah dan retribusi daerah 4) penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah b. Badan Usaha Milik Daerah 1) fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang usaha milik daerah lembaga keuangan 2) fasilitas serta bimbingan teknis dibidang badan usaha milik daerah lembaga non keuangan 3) penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi badan usaha milik daerah c. Badan Layanan Umum Daerah 1) analisis, standardisasi teknis, fasilitasi serta bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi dibidang pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah 2) pembinaan pelaksanaan kebijakan, standardisasi teknis, prosedur dan kriteria, fasilitasi serta bimbingan teknis penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah 3) penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah d. Pengelolaan Kekayaan Daerah 1) fasilitasi serta bimbingan teknis pengelolaan kekayaan 2) fasilitasi serta bimbingan teknis investasi daerah 3) penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan kekayaan dan investasi	Biasa/Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
			Biasa/Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
			Biasa/Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
			Biasa/Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait

NO	KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>c. Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam</p> <p>1) koordinasi penyiapan data dasar perhitungan, dan rekonsiliasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam</p> <p>2) Sosialisasi dan supervisi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam</p> <p>3) penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam</p>	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
		<p>d. Dana Otonomi Khusus dan Dana Transfer Lainnya</p> <p>1) sosialisasi dan supervisi dana otonomi khusus</p> <p>2) sosialisasi dan supervisi dan transfer lainnya</p> <p>3) pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan otonomi khusus dan dana transfer lainnya</p>	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
		<p>e. Dukungan Teknis Fasilitasi Dana Perimbangan</p> <p>1) penyiapan sinkronisasi kebijakan dan perimbangan</p> <p>2) penyiapan dukungan teknis dana perimbangan</p> <p>3) penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan dana perimbangan</p>	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
		4. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah					

